

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Voi.id
Media Cetak	

# DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Diah Ayu Wardani Reporter  
Advento C Saudale Editor

DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial JAKARTA - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mendesak Dinas Sosial DKI untuk mempercepat verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal ini diperlukan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial (Bansos) agar tepat sasaran. Tercatat, sekitar 5 juta warga Jakarta yang mendaftar sebagai calon penerima manfaat.

"DTKS dari desil 1 sampai desil 10 yang mendaftar hampir 5 juta warga dari 11 juta. Verifikasi data sampai kapan? sekarang pasif," ungkap Justin, dikutip Jumat, 22 November.

Dalam pembahasan rancangan APBD tahun 2025, anggaran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) yang akan disalurkan melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024, yakni Rp802 miliar.

Meskipun tak ada kenaikan anggaran, Justin berharap, Bansos PKD bisa tepat sasaran dengan percepatan verifikasi dan validasi terhadap seluruh permohonan dari warga Jakarta.

"Memang tidak ada penambahan, tapi yang lama diupayakan tetap berjalan. Tapi tak menutup kemungkinan juga dengan adanya verifikasi, akan ada yang dihapus dan diganti dengan desil yang paling rendah," tutur Justin.

Pasalnya, Bansos yang diberikan harus sesuai dengan peringkat kemiskinan yang telah dikelompokkan menjadi desil 1 sampai desil 4, sesuai tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Sebagai catatan, anggaran bansos PKD sebesar Rp802 miliar ini akan disalurkan kepada 219.252 penerima manfaat. Rinciannya, KLJ dengan target 171.010 penerima manfaat, KAJ dengan target 27.352 penerima manfaat, dan KPDJ dengan target 20.890 penerima manfaat.